

BAB I

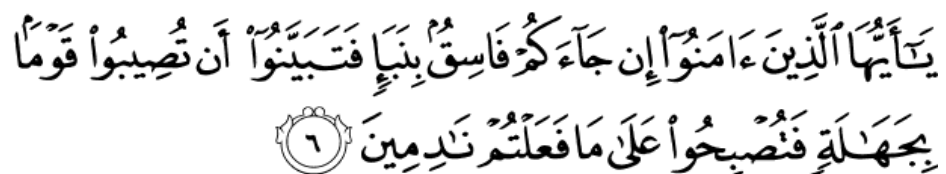
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Organisasi sektor publik di Indonesia, saat ini tidak hanya dituntut untuk sekedar menjadi organisasi yang bertujuan untuk melayani masyarakat. Lebih dari itu, organisasi sektor publik juga dituntut untuk melakukan pertanggungjawaban dan transparan. Sebagai salah satu bentuk organisasi sektor publik, seharusnya organisasi pemerintah seperti pemerintah daerah juga dituntut untuk dapat melakukan transparansi dan akuntabilitas. Hal ini sejalan dengan tuntutan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dinyatakan bahwa adanya perubahan sistem pemerintahan dari sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi dan otonomi daerah sehingga pemerintah daerah dituntut agar dapat mengelola dan mempertanggungjawabkan rumah tangganya secara mandiri dan profesional.

Meningkatnya tuntutan masyarakat ini semata-mata agar terwujudnya pemerintahan daerah yang semakin baik (*good government*), sehingga menuntut pemerintah daerah untuk dapat menerapkan transparansi dan akuntabilitas yang dapat diwujudkan dengan pelaporan keuangan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah memiliki fungsi untuk menyediakan informasi yang informatif bagi penyedia dana maupun pemakai

lainnya dalam pembuatan keputusan serta gambaran kondisi suatu pemerintah (Suwardjono, 2005). Laporan keuangan menjadi alternatif untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah karena laporan keuangan merupakan bukti untuk mempertanggungjawabkan atas semua kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam periode tertentu. Laporan keuangan harus disusun dan dirancang sebaik mungkin, benar, tepat waktu dan tepat sasaran sesuai dengan standar-standar yang berlaku untuk menyajikan laporan keuangan yang berkualitas demi terwujudnya *good government*. Apabila laporan keuangan yang disajikan tidak berkualitas dengan melaporkan hal yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya akan memberikan informasi yang menyesatkan bagi penggunanya, sehingga dapat merugikan berbagai pihak. Dalam surat Al Hujurat ayat 6 dijelaskan sebagai berikut:



يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنْ جَاءَكُمْ فٰسِقٌ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْا اَنْ تُصِيبُوْا قَوْمًا

بِجَهٰلَةٍ فَنُصِبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu”

Mengingat betapa penting fungsi laporan keuangan yang harus disampaikan oleh pemerintah, maka sudah waktunya pemerintah berbenah diri untuk menyampaikan laporan keuangan yang lebih baik dan berkualitas. Secara sederhana bahwa kualitas laporan keuangan dapat dilihat dari opini audit yang diberikan terhadap laporan keuangan. Meskipun demikian, hingga

saat ini pemerintah daerah masih banyak menyajikan datang yang tidak sesuai dalam pelaporan keuangannya. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih banyak menemukan penyimpangan dalam pemeriksaan laporan keuangan yang berpengaruh pada opini audit yang diberikan oleh BPK pada setiap pemerintah daerah.

Tabel 1. 1
Opini Audit BPK Perwakilan Jawa Timur 2014-2016

No	Opini BPK	Tahun		
		2014	2015	2016
1	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	2	1	29
2	Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP)	15	24	-
3	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	21	14	10
4	Tidak Wajar (TW)	1	-	-

Sumber: Annual Report BPK Perwakilan Jawa Timur tahun 2014-2016

Dalam laporan audit tahun 2015 untuk periode 2014, dari 39 pemerintah daerah yang ada di provinsi Jawa Timur hanya terdapat satu pemerintah daerah yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yaitu pemerintah daerah Kabupaten Pacitan. Ada 14 pemerintah daerah mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), sedangkan 24 pemerintah daerah lainnya mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP). Pada laporan BPK tahun 2016, terdapat 29 pemerintah daerah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan ada 10 lainnya masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Walaupun secara keseluruhan telah mengalami peningkatan, tapi terdapat 10 pemerintah daerah yang masih mendapat opini WDP yang artinya bahwa belum semua laporan

keuangan pemerintah daerah diakui WTP oleh BPK atau belum sepenuhnya berkualitas. Terbukti dengan banyaknya laporan keuangan yang belum bisa memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang berarti penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah masih banyak yang belum sesuai dengan standar-standar yang sebagai mana seharusnya dalam tata cara penyajian laporan keuangan.

Standar-standar penyajian laporan keuangan pemerintah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yaitu sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang dalam perkembangannya dituntut untuk mengalami berbagai perubahan. Perubahan standar dan aturan yang terjadi dalam tata cara penyajian laporan keuangan pemerintah dari basis kas menjadi basis akrual membuat kemampuan aparatur pengelola laporan keuangan semakin dibutuhkan. Oleh karena itu, diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten di bidang penyusunan laporan keuangan agar dapat memahami dengan baik dan cepat agar bisa menyajikan laporan keuangan yang berkualitas. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Yosefrinaldi (2013), Nurillah dan Muid (2014), dan Ihsanti (2014) yang menyebutkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Selain kompetensi sumber daya manusia yang memadai, pemanfaatan sistem informasi akuntansi (SIA) juga dibutuhkan. Sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem yang terintegrasi untuk mengumpulkan, mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas, suatu data transaksi yang diubah menjadi

informasi yang bermanfaat untuk pemakai internal agar dapat digunakan dalam pengendalian ataupun pembuatan keputusan. Dalam rangka menyelenggarakan laporan keuangan yang berkualitas, perlu adanya pemanfaatan sistem informasi akuntansi dengan bijak sehingga dapat mendukung pemerintah daerah mencapai tujuannya dengan ekonomis, efektif, dan efisien (Diani, 2014). Hal ini telah dibuktikan dengan hasil penelitian Yosefrinaldi (2013), Nurillah dan Muid (2014), dan Andini dan Yusrawati (2015) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif antara sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan.

Pemeriksaan audit BPK tidak hanya terbatas pada kesesuaian laporan keuangan dengan SAP tetapi juga dinilai dari kesesuaiannya dengan Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang diterapkan pada masing-masing pemerintah daerah. Hal lainnya yang dapat berpengaruh terhadap kualitas sebuah laporan keuangan adalah penerapan sistem pengendalian internal pemerintah yang efektif. Sistem pengendalian internal berisi seluruh proses, sistem, dan tahap-tahap yang harus dilakukan termasuk di dalamnya prosedur yang harus diperhatikan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah. Sistem pengendalian internal pemerintah memiliki peran dalam penyusunan laporan keuangan sebagai pengendali dan pengawas penyusunan laporan keuangan agar dapat dilaporkan dan disusun tepat waktu, tepat sasaran, benar, dan sesuai dengan standar agar memperoleh opini audit yang baik, yang artinya bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini telah dibuktikan dengan hasil penelitian Yosefrinaldi (2013), Nurillah

dan Muid (2014), Syarifudin (2014) dan Mahaputra dan Putra (2014) yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Peneliti menduga sistem pengendalian internal dapat memediasi sistem informasi akuntansi dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan. Alasan dugaan pertama sesuai dengan fungsi sistem pengendalian internal yang dikatakan yaitu sebagai pengendali dan pengaturan sistem pemerintah dalam mengelola penerimaan dan penggunaan dana secara transparan, efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan. Fungsi sistem pengendalian internal tersebut sejalan dengan tujuan adanya kompetensi sumber daya manusia dan sistem informasi akuntansi yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan keuangan serta dapat memperbaiki kualitas laporan keuangan. Fungsi yang sejalan dengan fungsi sistem pengendalian internal tersebut membuat peneliti menduga bahwa kualitas laporan keuangan akan semakin baik, yang dapat dilihat dari hasil audit BPK.

Penelitian Syarifudin (2014) di Pemerintah Kabupaten Kebumen menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurillah dan Muid (2014) yang menunjukkan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam penelitian Syarifudin (2014), sistem pengendalian internal pemerintah mampu memediasi pengaruh

kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Atas dasar penelitian diatas, maka peneliti ingin melakukan penelitian ulang dengan menambahkan variabel sistem informasi akuntansi sebagai variabel independen dan menggunakan efektivitas sistem pengendalian internal sebagai variabel intervening dalam mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pada penelitian ini objek penelitiannya adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di pemerintah provinsi Jawa Timur, karena laporan keuangan pemerintah daerah sejatinya merupakan laporan keuangan konsolidasi dari seluruh OPD dalam pemerintah daerah. Dari enam provinsi yang ada di pulau Jawa hanya BPK Perwakilan Jawa Timur yang telah mempublikasikan hasil auditnya di website dalam bentuk annual report, selain itu juga disebabkan karena dalam dua tahun terakhir pemerintah provinsi jawa timur masih mampu mempertahankan opini audit murni WTP setelah tiga tahun sebelumnya belum berhasil mendapatkan opini WTP serta prestasi yang diraih oleh masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur bahwa pada tahun 2014 hanya ada satu pemerintah daerah yang memperoleh opini murni WTP dan pada tahun berikutnya melonjak menjadi 29 pemerintah daerah yang mendapatkan opini WTP.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini diberi judul:
“PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP KUALITAS LAPORAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

DENGAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL SEBAGAI VARIABEL INTERVENING”.

B. Batasan Masalah

Batasan masalah ini bertujuan untuk memberikan batasan yang jelas dari permasalahan yang ada untuk memudahkan penelitian. Dari berbagai faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan OPD maka penelitian ini hanya melakukan pengujian pada tiga variabel membatasi variabel yaitu pemanfaatan sistem informasi akuntansi, kompetensi sumber daya manusia, dan sistem pengendalian internal untuk membatasi penelitian.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan yang telah diuraikan, peneliti merumuskan masalah berikut:

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap efektivitas sistem pengendalian internal?
2. Apakah pemanfaatan sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap efektivitas sistem pengendalian internal?
3. Apakah efektivitas sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
4. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
5. Apakah pemanfaatan sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?

6. Apakah efektivitas sistem pengendalian internal mampu memediasi pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan?
7. Apakah efektivitas sistem pengendalian internal mampu memediasi pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan?

D. Tujuan Penelitian

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris:

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap efektivitas sistem pengendalian internal
2. Apakah pemanfaatan sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap efektivitas sistem pengendalian internal
3. Apakah efektivitas sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan
4. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan
5. Apakah pemanfaatan sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan
6. Apakah efektivitas sistem pengendalian internal mampu memediasi pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan

7. Apakah efektivitas sistem pengendalian internal mampu memediasi pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan

E. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan akan dapat memberikan manfaat sebagai sumbangsih kepada semua pihak. Begitupula dengan penelitian ini, adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat secara praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan oleh pemerintah daerah dalam pengambilan kebijakan dalam mengembangkan pemanfaatan sistem informasi akuntansi, kompetensi sumber daya manusia, dan efektivitas sistem pengendalian internal dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah.

b. Bagi Perguruan Tinggi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur-literatur mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan sistem informasi akuntansi, dan efektivitas sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi yang dapat membantu masyarakat mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan sistem informasi

akuntansi, dan efektivitas sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Manfaat secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya dan memberikan kontribusi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dibidang akuntansi sektor publik di Indonesia.